



Peran Sektor Swasta Dalam Implementasi Kampung Iklim di Kampung Kayu Ara Permai

Dewi Mujta Indah^{1*}, Harsini²

¹Universitas Lancang Kuning, Indonesia

²Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Alamat: Jl. Yos Sudarso KM.8, Umban Sari, Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau 28266, Indonesia

Korespondensi penulis: dewimujta0304@gmail.com, harsini@unilak.ac.id

Abstract. *Climate change is a major challenge for Indonesia, which requires the involvement of various actors across sectors in mitigation and adaptation efforts. The Climate Village Program (ProKlim) exists as a community-based approach, but its implementation is still constrained by the lack of systematic private sector involvement and limited coordination between actors. This research aims to analyze the role of the private sector in the implementation of ProKlim in Kampung Kayu Ara Permai using a collaborative governance framework. The method used was descriptive qualitative through in-depth interviews, participatory observations, and documentation studies with the validity of triangulation of sources and methods. The results of the study show that the private sector plays a strategic role as facilitators, enablers, resource providers, mediators, and implementers of field activities. The involvement of actors such as PHR, CIFOR, SPLP, and PT ITA has a positive impact on the environment, socially, economically, and institutionally. However, the dominance of the private sector has the potential to cause dependency if it is not balanced with strengthening the capacity of local communities. This study recommends a balance of roles between actors and better integration with local government policies to ensure the long-term sustainability of the program.*

Keywords: *Private Sector, Climate Village Program (ProKlim), Collaborative Governance, Climate Change, Community Empowerment.*

Abstrak. Perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang menuntut keterlibatan berbagai aktor lintas sektor dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Program Kampung Iklim (ProKlim) hadir sebagai pendekatan berbasis komunitas, namun implementasinya masih terkendala minimnya keterlibatan sektor swasta secara sistematis serta terbatasnya koordinasi antaraktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sektor swasta dalam implementasi ProKlim di Kampung Kayu Ara Permai menggunakan kerangka collaborative governance. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dengan validitas triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor swasta menjalankan peran strategis sebagai fasilitator, enabler, penyedia sumber daya, mediator, dan pelaksana kegiatan lapangan. Keterlibatan aktor seperti PHR, CIFOR, SPLP, dan PT ITA berdampak positif secara lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Namun, dominasi sektor swasta berpotensi menimbulkan ketergantungan jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Penelitian ini merekomendasikan keseimbangan peran antaraktor dan integrasi yang lebih baik dengan kebijakan pemerintah daerah guna menjamin keberlanjutan program jangka panjang.

Kata kunci: Sektor Swasta, Program Kampung Iklim (ProKlim), Collaborative Governance, Perubahan Iklim, Pemberdayaan Masyarakat.

1. LATAR BELAKANG

Perubahan iklim kini dipandang sebagai salah satu isu krusial yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai negara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, Indonesia menghadapi berbagai dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga bencana kompleks seperti siklon tropis yang berpotensi

mengganggu sektor pertanian, kesehatan, serta wilayah pesisir. Apabila tidak diimbangi dengan langkah mitigasi dan adaptasi yang memadai, perubahan iklim dapat mengurangi ketahanan pangan, memperbesar potensi terjadinya bencana, serta memperlambat pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional. Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggagas Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai kebijakan strategis berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat di tingkat lokal dalam menghadapi perubahan iklim (Khuriyatul Husna & Aleksander Yandra, 2023). Raditya et al. (2025) menyatakan bahwa perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan pembangunan global secara menyeluruh. Keterlibatan nyata dari masyarakat dan sektor swasta secara bersamaan.

Indonesia telah menunjukkan respons terhadap tantangan perubahan iklim melalui beragam kebijakan yang bersifat strategis. Bukti empiris mengindikasikan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, baik dari aspek ekologis maupun sosial-ekonomi. Situasi ini menuntut penerapan strategi adaptasi dan mitigasi yang terpadu, berkelanjutan, serta melibatkan keterlibatan aktif berbagai aktor lintas sektor. Upaya penanganan tersebut tidak lagi dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, melainkan memerlukan penerapan prinsip *collaborative governance* yang mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, salah satunya melalui Program Kampung Iklim (ProKlim). Program ini dirancang sebagai pendekatan berbasis komunitas yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Iskandar et al., (2022) Menjelaskan bahwa ProKlim menjadi salah satu inovasi kebijakan yang berhasil mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka program yang terpadu. Implementasi ProKlim menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di tingkat komunitas. Susanti et al., (2022) Juga menambahkan program ini turut mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan koordinasi antaraktor serta rendahnya keterlibatan sektor swasta yang belum terintegrasi secara sistematis.

Secara kebijakan, pelaksanaan Program Kampung Iklim diperkuat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim yang kemudian diperbarui melalui

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021. Regulasi tersebut menegaskan bahwa ProKlim merupakan program nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca melalui partisipasi aktif masyarakat dan dukungan para pemangku kepentingan. Dalam implementasinya, ProKlim menekankan pentingnya kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta sebagai bagian dari upaya penguatan pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan di tingkat local. (Safrina et al., 2022)

Kampung Kayu Ara Permai menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk dikaji karena dinilai berhasil mengembangkan berbagai kegiatan ProKlim berbasis partisipasi masyarakat, seperti pengelolaan lingkungan, penghijauan, pengelolaan sampah, hingga penguatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Kampung ini mulai dikembangkan dan dibentuk sebagai kawasan Program Kampung Iklim (ProKlim) pada tahun 2022 melalui pendampingan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Universitas Lancang Kuning. Keberhasilan implementasi ProKlim di Kampung Kayu Ara Permai tidak hanya didukung oleh peran masyarakat dan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan program. Kehadiran aktor swasta memberikan kontribusi dalam bentuk dukungan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi ProKlim di Kampung Kayu Ara Permai tidak dapat berjalan secara optimal apabila hanya mengandalkan kapasitas masyarakat dan pemerintah semata. Kompleksitas permasalahan lingkungan dan kebutuhan sumber daya yang cukup besar menuntut adanya sinergi lintas sektor melalui pendekatan *collaborative governance*. (Nurpeni et al., 2022)

Keterlibatan sektor swasta menjadi penting karena aktor ini memiliki sumber daya, kapasitas manajerial, serta jaringan yang dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan program di tingkat lokal. Selain itu, sektor swasta juga berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam membangun hubungan kolaboratif antaraktor sehingga pelaksanaan ProKlim dapat berjalan lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Kampung Kayu Ara Permai menjadi relevan untuk diteliti sebagai contoh praktik *collaborative governance* dalam pengembangan ProKlim, khususnya untuk melihat bagaimana peran sektor swasta dapat mendorong keberhasilan program perubahan iklim berbasis masyarakat di tingkat local (Pradessa et al., 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Sektor swasta memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan ProKlim melalui berbagai bentuk kontribusi yang melampaui sekadar aspek pendanaan. Peran sektor swasta mencakup inovasi teknologi, transfer pengetahuan, pengembangan kapasitas lokal, serta implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). Wiati et al. (2022) menyatakan bahwa penguatan potensi desa menuju ProKlim memerlukan dukungan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta sebagai mitra strategis pembangunan. Namun dalam praktiknya, keterlibatan sektor swasta masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka program. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi peran sektor swasta dalam mendukung program berbasis komunitas ini.

Untuk menjawab kompleksitas permasalahan tersebut, *collaborative governance* berkembang sebagai paradigma yang relevan dalam tata kelola publik modern. Paradigma ini menekankan keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan secara kolektif. Menurut Ansell & Gash (2008) *Collaborative governance* merupakan proses di mana aktor publik dan non-publik terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan kolektif yang bersifat konsensus. Model ini mencakup empat komponen utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan keberlanjutan program pembangunan secara signifikan (Khasanah et al., 2021). Hal ini menegaskan bahwa kolaborasi bukan hanya soal struktur formal, tetapi juga proses sosial yang kompleks dan dinamis. Dalam hal ini, sektor swasta dapat berperan tidak hanya sebagai penyedia sumber daya, tetapi juga sebagai fasilitator maupun katalisator dalam proses pengembangan program di tingkat komunitas.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar kajian ProKlim masih berfokus pada peran pemerintah dan masyarakat, sehingga terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. (Susanti et al., 2022) dan (Rusanda et al., 2025) Lebih menekankan partisipasi masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan program. Indriyani et al.,(2024) Juga lebih banyak mengkaji aspek kelembagaan dan efektivitas program dari sisi internal. Peran sektor swasta sebagai bagian dari kolaborasi multi-aktor dalam kerangka ProKlim masih belum banyak dikaji secara mendalam dan sistematis. Velinsca et al., (2025) Menunjukkan bahwa efektivitas ProKlim di wilayah Riau dipengaruhi oleh kondisi lokal dan kapasitas masyarakat yang unik, mengindikasikan pentingnya kajian kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini hadir

untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menempatkan sektor swasta sebagai fokus utama analisis.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat kolaborasi multi-aktor dalam menghadapi perubahan iklim di tingkat lokal. Raditya et al. (2025) menegaskan bahwa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan memerlukan sinergi nyata antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta secara terpadu. Tanpa keterlibatan aktif sektor swasta, upaya pengembangan ProKlim akan terus menghadapi keterbatasan sumber daya, teknologi, dan inovasi. Dengan menggunakan kerangka collaborative governance, penelitian ini bermaksud mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan sektor swasta serta dampaknya terhadap keberhasilan program di Kampung Kayu Ara Permai. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan strategi pengembangan ProKlim yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi multi-aktor di tingkat lokal (Giyanto & Murtinah, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran sektor swasta dalam mendorong pengembangan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kampung Kayu Ara Permai. Pendekatan kualitatif deskriptif memberikan ruang bagi peneliti untuk menguraikan secara komprehensif fenomena pelaksanaan program kampung iklim dalam konteks sosial dan lingkungan Masyarakat (Lestari et al., 2025). Proses pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, yakni wawancara mendalam dengan informan kunci yang meliputi pengelola program, tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat, observasi partisipatif terhadap aktivitas ProKlim, dan studi dokumentasi yang bersumber dari arsip program serta dokumen pendukung lainnya (Khuriyatul husna & Alexsander Yandra, 2023). Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk memastikan kredibilitas temuan penelitian (Ajemba & Arene, 2022). Sementara itu, pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga diperoleh informasi yang komprehensif terkait aspek collaborative governance serta efektivitas program kampung iklim (Hudaya & Dewi, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Kayu Ara Permai merupakan salah satu kampung pesisir di Kabupaten Siak yang dikenal aktif dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan Program Kampung Iklim (ProKlim). Kampung ini memiliki potensi ekosistem mangrove yang cukup luas dan dikelola secara partisipatif oleh masyarakat bersama kelompok konservasi seperti Laskar Mandiri. Berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilakukan melalui penghijauan, konservasi mangrove, pengelolaan sampah, pemanfaatan pekarangan, serta pengembangan wisata edukasi mangrove berbasis masyarakat. Selain itu, Kampung Kayu Ara Permai juga menerapkan pola kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam mendukung ketahanan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kampung Kayu Ara Permai, sektor swasta dan berbagai aktor kolaboratif memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan program, seperti Center for International Forestry Research (CIFOR) berperan sebagai enabler teknis melalui pengembangan agroforestri, pembentukan kelompok tani, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berbasis keberlanjutan. Sementara itu, Siak Pelalawan Landscape Program (SPLP) menjalankan fungsi fasilitator dengan melakukan sosialisasi ProKlim, mendukung kegiatan KKN, serta memperkuat koordinasi antaraktor dalam pelaksanaan program lingkungan.

Di tingkat masyarakat, Mangrove Sungai Bersejarah (MSB) / Komunitas Laskar Mandiri memiliki peran sebagai implementator sekaligus mediator yang aktif menggerakkan partisipasi masyarakat, melaksanakan kegiatan lapangan, dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak eksternal. Dukungan dari sektor perusahaan juga terlihat melalui keterlibatan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang berperan sebagai enabler dan resource provider melalui penyediaan dana CSR, pelatihan, serta pendampingan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan ProKlim. Selain itu, PT Imbang Tata Alam (PT ITA) turut mendukung program sebagai enabler dan support system melalui bantuan pendanaan, penyediaan sarana prasarana, serta edukasi lingkungan bagi masyarakat Kampung Kayu Ara Permai.

Tidak hanya sektor swasta dan komunitas, kalangan Akademisi juga berperan sebagai supporting actor melalui pelaksanaan KKN, penelitian, serta pendampingan ilmiah yang membantu pengembangan pengetahuan dan evaluasi pelaksanaan ProKlim. Kolaborasi antaraktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan ProKlim di Kampung Kayu Ara Permai tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga ditentukan oleh sinergi antara sektor

swasta, komunitas masyarakat, lembaga penelitian, dan akademisi dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Setiap kategori peran menunjukkan fungsi spesifik yang dijalankan oleh masing-masing aktor, mulai dari fasilitasi, pemberdayaan, hingga implementasi langsung di lapangan. Keterlibatan berbagai pihak seperti sektor swasta, lembaga penelitian, dan komunitas lokal mencerminkan adanya pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan program.

Tabel peran sektor swasta di kampung kayu ara permai

Aktor	Peran Utama	Bentuk Kontribusi
CIFOR	Enabler teknis	Agroforestri, pembentukan kelompok tani
SPLP	Fasilitator	Sosialisasi, KKN, koordinasi
MSB (Komunitas)	Implementator & mediator	Sosialisasi, penggerak masyarakat
PHR	Enabler & resource provider	CSR, pelatihan, pendampingan
PT ITA	Enabler & support system	Pendanaan, sarana, edukasi
Akademisi	Supporting actor	KKN, penelitian

Penelitian ini menganalisis implementasi program Kampung Iklim Kampung Kayu Ara Permai, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, berdasarkan empat model collaborative governance menurut Ansell & Gash yang mencakup empat komponen utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif.

1. Kondisi awal

Pada tahap awal, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan masih relatif rendah, yang terlihat dari sistem pengelolaan sampah yang belum tertata dengan baik serta minimnya inisiatif penghijauan secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu lingkungan belum menjadi prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Keadaan tersebut sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa keberhasilan collaborative governance sangat dipengaruhi oleh kondisi awal, terutama terkait distribusi sumber daya dan tingkat kepercayaan antar aktor yang terlibat (Wahyuningwidi & Irdyanti 2023) Dengan demikian, fase awal ini mencerminkan adanya keterbatasan kapasitas internal yang sekaligus menjadi tantangan dan titik awal bagi masuknya intervensi eksternal.

Dalam konteks tersebut, kehadiran aktor eksternal seperti PHR, SLPL, NGO CIFOR, Laskar Mandiri, dan PT ITA menjadi faktor krusial dalam mendorong terjadinya perubahan.

Para aktor ini menghadirkan beragam sumber daya, mulai dari dukungan pendanaan, pengetahuan teknis, hingga jejaring kolaboratif yang sebelumnya belum dimiliki masyarakat. Peran yang dijalankan tidak hanya terbatas sebagai pemberi bantuan, tetapi juga sebagai katalisator yang memicu tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya ProKlim. Berdasarkan hasil wawancara, sektor swasta berperan sebagai agen transformasi yang memperkenalkan praktik pengelolaan lingkungan yang lebih terstruktur dan sistematis. Temuan ini selaras dengan literatur yang menegaskan bahwa aktor non-negara memiliki posisi strategis dalam mendorong perubahan sosial berbasis lingkungan (Oktaviana & Setiawan, 2021).

Lebih lanjut, interaksi awal antara masyarakat dan sektor swasta memperlihatkan pola hubungan yang masih terbatas dan cenderung bersifat top-down, terutama melalui kegiatan sosialisasi serta penyaluran bantuan tahap awal. Meskipun demikian, proses tersebut menjadi langkah awal yang penting dalam membangun kepercayaan di antara para aktor yang terlibat. Kepercayaan yang mulai terbentuk ini memiliki peran strategis sebagai fondasi bagi pengembangan kolaborasi pada tahap selanjutnya. Dalam kerangka collaborative governance, trust building merupakan faktor krusial yang memengaruhi tingkat partisipasi dan komitmen aktor dalam jangka Panjang (Amir et al., 2022). Oleh karena itu, meskipun pola interaksi awal masih terbatas, keberadaannya tetap signifikan dalam membentuk dinamika kolaborasi di masa mendatang.

Dari sudut pandang sumber daya, terlihat adanya kesenjangan kapasitas yang cukup signifikan antara masyarakat lokal dan sektor swasta. Pihak swasta memiliki keunggulan dalam hal akses terhadap pendanaan, teknologi, serta jaringan kelembagaan, sedangkan masyarakat lebih unggul dalam pengetahuan lokal dan ikatan sosial yang kuat. Perbedaan ini justru membuka peluang terciptanya sinergi yang saling melengkapi dalam proses kolaboratif. Namun demikian, pada tahap awal, belum terbentuknya kelembagaan yang kokoh menyebabkan koordinasi masih berlangsung secara informal dan sangat bergantung pada inisiatif individu serta dukungan dari pihak eksternal. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan belum berkembang secara optimal, sehingga peran sektor swasta cenderung lebih dominan dalam menginisiasi program. Secara keseluruhan, kondisi awal ini menggambarkan masih rendahnya kapasitas internal masyarakat serta tingginya ketergantungan terhadap aktor eksternal, namun di sisi lain juga menghadirkan peluang strategis untuk membangun fondasi collaborative governance yang berkelanjutan (Nahrudin et al., 2024).

Aspek	Kondisi Awal Temuan
Kesadaran Masyarakat	Rendah, belum memahami ProKlim
Pengelolaan Lingkungan	Belum terstruktur
Peran Awal Swasta	Inisiator, fasilitator awal
Pola Interaksi	Top-down → awal kolaborasi
Sumber Daya	Tidak seimbang (swasta dominan)
Kelembagaan	Belum terbentuk kuat
Tingkat Kepercayaan	Mulai terbentuk (early trust)

2.Desain kelembagaan

Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kampung Kayu Ara Permai memperlihatkan peran yang bersifat kompleks dan tidak lagi terbatas pada fungsi tradisional sebagai penyedia pendanaan semata. Secara lebih rinci, keterlibatan sektor swasta dapat diklasifikasikan ke dalam lima peran utama, yakni sebagai fasilitator, enabler atau penguat kapasitas, penyedia sumber daya, mediator kolaborasi, serta pelaksana kegiatan di lapangan. Pola keterlibatan ini menunjukkan bahwa peran sektor swasta telah berkembang menuju bentuk collaborative governance yang lebih substantif, di mana aktor non-negara tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program (Nurhasanah et al., 2022) Dengan demikian, posisi sektor swasta menjadi semakin strategis dalam mendukung keberhasilan program berbasis kolaborasi.

Dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, sektor swasta berfungsi sebagai penghubung berbagai kepentingan antaraktor, mencakup masyarakat, pemerintah, serta kalangan akademisi. Peran ini diwujudkan melalui penyediaan ruang diskusi, forum komunikasi, serta dukungan terhadap berbagai kegiatan lingkungan yang melibatkan partisipasi kolektif. Dalam perspektif collaborative governance, fungsi tersebut berkaitan erat dengan konsep facilitative leadership, yaitu kemampuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya kolaborasi yang efektif. Hasil temuan menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kapasitas aktor dalam membangun interaksi sosial yang inklusif dan partisipatif. Keberhasilan tersebut sekaligus mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghasilkan kebijakan publik yang responsif dan efektif (Judijanto et al., 2023). Oleh karena itu, peran fasilitatif ini menjadi elemen penting dalam menjaga dinamika kolaborasi.

Selain itu, sektor swasta turut menjalankan fungsi sebagai enabler melalui berbagai aktivitas seperti pelatihan, transfer pengetahuan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Upaya ini mencerminkan adanya proses capacity building yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam jangka panjang. Penguatan kapasitas lokal menjadi faktor yang sangat krusial dalam menjamin keberlanjutan program berbasis komunitas, karena masyarakat didorong agar mampu mengelola program secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pihak eksternal (2025). Dengan demikian, kontribusi sektor swasta tidak hanya berdampak langsung, tetapi juga mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan.

Dari aspek penyediaan sumber daya serta peran kolaboratif lainnya, sektor swasta memberikan kontribusi yang cukup signifikan melalui dukungan pendanaan CSR, penyediaan infrastruktur, serta akses terhadap teknologi lingkungan. Selain itu, sektor swasta juga menjalankan fungsi sebagai mediator yang menghubungkan berbagai aktor lintas sektor yang sebelumnya belum terintegrasi, sekaligus berperan sebagai pelaksana langsung dalam sejumlah kegiatan ProKlim seperti penghijauan dan pengelolaan sampah. Peran yang bersifat ganda ini menunjukkan bahwa sektor swasta mampu bertindak sebagai boundary spanner yang menjembatani perbedaan kepentingan sekaligus memperkuat implementasi program di lapangan. Namun demikian, dominasi dalam penyediaan sumber daya berpotensi menimbulkan ketergantungan apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas masyarakat. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan sektor swasta telah mencerminkan praktik collaborative governance yang ideal, di mana keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas interaksi serta sinergi antaraktor (Setiawati et al., 2024)

Kategori Peran	Bentuk Kegiatan	Dampak Langsung
Fasilitator	Forum dialog, koordinasi	Meningkatkan partisipasi
Enabler	Pelatihan, edukasi	Peningkatan kapasitas
Penyedia Sumber Daya	CSR, alat, bibit	Mendukung operasional
Mediator	Menghubungkan aktor	Mengurangi konflik
Aktor Implementasi	Penghijauan, bank sampah	Output program nyata

3. Kepemimpinan fasilitatif,

Dukungan yang diberikan oleh sektor swasta dalam pengembangan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kampung Kayu Ara Permai menunjukkan pola yang komprehensif dan saling terintegrasi. Bentuk dukungan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek pendanaan, tetapi

juga mencakup dimensi teknis, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, hingga perluasan jejaring kolaborasi. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor swasta tidak lagi sekadar berperan sebagai pihak pendukung, melainkan telah menjadi bagian strategis dalam struktur kolaboratif yang menopang keberlanjutan program. Dalam perspektif collaborative governance, kondisi ini mencerminkan adanya ketergantungan sumber daya antaraktor (resource interdependence) yang menjadi fondasi utama dalam membangun kolaborasi yang efektif (Setiawati et al., 2024).

Salah satu bentuk dukungan yang paling menonjol terlihat pada kontribusi finansial melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Dukungan dana ini berperan sebagai pemicu awal dalam pelaksanaan berbagai kegiatan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, serta penyediaan fasilitas berbasis masyarakat. Peran tersebut menunjukkan bahwa sektor swasta mampu mengatasi keterbatasan anggaran di tingkat lokal yang sering kali menjadi hambatan dalam implementasi program lingkungan. Sejalan dengan temuan tersebut, literatur menegaskan bahwa kontribusi finansial dari aktor non-pemerintah dapat memperkuat kapasitas implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks desentralisasi (Judijanto et al., 2025).

Selain dari aspek pendanaan, sektor swasta juga memberikan dukungan teknis melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, serta edukasi lingkungan kepada masyarakat. Upaya ini berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola ProKlim secara mandiri dan berkelanjutan. Kegiatan seperti pelatihan pengelolaan sampah dan komposting menjadi media penting dalam mentransfer pengetahuan sekaligus keterampilan praktis kepada masyarakat. Di samping itu, penyediaan sarana dan prasarana seperti tempat sampah, alat pengolahan limbah, serta bibit tanaman turut memperkuat pelaksanaan program di tingkat lapangan. Dalam kajian teoritis, proses transfer pengetahuan dan ketersediaan sumber daya fisik merupakan elemen kunci dalam penguatan kapasitas kelembagaan serta keberhasilan kebijakan lingkungan berbasis komunitas, di mana keterlibatan sektor swasta dalam pelatihan dan pendampingan mampu memperkuat upaya masyarakat dalam mencapai pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (Anhar et al., 2023).

Lebih jauh, sektor swasta turut berperan dalam memperkuat kelembagaan melalui pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli lingkungan, termasuk peningkatan kapasitas manajerial serta penataan struktur organisasi. Di samping itu, kontribusi dalam membangun jaringan (networking) dengan menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, akademisi, dan berbagai lembaga lainnya turut membuka peluang akses terhadap sumber daya tambahan. Dengan demikian, sektor swasta berfungsi sebagai penghubung yang memperkuat

jejaring kolaborasi antaraktor. Secara keseluruhan, beragam bentuk dukungan tersebut bersifat sistemik dan saling melengkapi, sehingga mampu menciptakan ekosistem kolaborasi yang mendukung keberlanjutan program. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan collaborative governance sangat dipengaruhi oleh kemampuan para aktor dalam mengelola serta mendistribusikan sumber daya secara efektif dan inklusif (Purnaweni et al., 2025).

Jenis Dukungan	Bentuk Konkret	Fungsi dalam ProKlim
Finansial	Dana CSR	Mendukung kegiatan program
Teknis	Pelatihan, edukasi	Peningkatan kapasitas
Sarana-Prasarana	Alat sampah, bibit	Mendukung implementasi
Kelembagaan	Pembentukan kelompok	Penguatan organisasi
Jaringan	Link ke pemerintah/akademisi	Perluasan kolaborasi

4. Proses kolaboratif

Berdasarkan hasil pengolahan data wawancara, keterlibatan sektor swasta dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kampung Kayu Ara Permai menunjukkan dampak yang luas dan multidimensional, mencakup aspek lingkungan, sosial, ekonomi, kelembagaan, serta dinamika peningkatan aktivitas berbasis lingkungan, sekaligus merefleksikan adanya perubahan struktural yang mendukung keberlanjutan program dalam jangka panjang. Dalam perspektif collaborative governance, kondisi ini mengindikasikan tercapainya intermediate outcomes sebagai penanda awal keberhasilan proses kolaboratif antaraktor (Nurhasanah et al., 2022).

Dari aspek lingkungan, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kualitas lingkungan yang cukup signifikan, ditandai dengan semakin efektifnya pengelolaan sampah, berkembangnya aktivitas penghijauan, serta berkurangnya praktik pembuangan limbah secara sembarangan. Perubahan ini tidak terlepas dari kontribusi sektor swasta melalui penyediaan fasilitas serta pendampingan teknis yang mendorong masyarakat untuk mengadopsi perilaku yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, pada dimensi sosial, keterlibatan sektor swasta turut berimplikasi pada meningkatnya partisipasi masyarakat serta tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan. Masyarakat tidak lagi sekadar berperan sebagai penerima manfaat, melainkan telah bertransformasi menjadi aktor aktif dalam pengelolaan

lingkungan, yang mencerminkan berlangsungnya proses social learning dalam kerangka kolaborasi.(Muchtar, 2025)

Dari perspektif ekonomi, keberadaan program seperti bank sampah memberikan nilai tambah bagi masyarakat, meskipun masih berada dalam skala yang terbatas. Aktivitas ini memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat finansial dari praktik pengelolaan lingkungan, sehingga menciptakan keterkaitan antara keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, pada dimensi kelembagaan, keterlibatan sektor swasta mendorong terbentuknya organisasi lokal yang lebih terstruktur, seperti kelompok pengelola ProKlim dan komunitas peduli lingkungan. Penguatan kelembagaan ini menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program, meskipun masih dihadapkan pada tantangan terkait konsistensi partisipasi serta kapasitas manajerial kelompok. Selain itu, dari sudut pandang kolaboratif, terlihat adanya peningkatan tingkat kepercayaan antaraktor yang memperkuat hubungan kerja sama, walaupun pola relasi yang terbentuk masih cenderung asimetris dengan dominasi sektor swasta (Putra et al., 2025).

Lebih lanjut, hasil analisis juga mengungkap sejumlah temuan yang tidak terduga, seperti tingginya tingkat ketergantungan pada tahap awal terhadap dukungan sektor swasta serta belum optimalnya integrasi program dengan kebijakan pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam penyelarasan peran dan kebijakan antaraktor dalam proses kolaborasi. Di sisi lain, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya cakupan informan yang belum sepenuhnya representatif serta adanya potensi bias subjektivitas dalam interpretasi data kualitatif. Oleh karena itu, temuan penelitian ini perlu dipahami sebagai gambaran yang bersifat kontekstual. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan ProKlim, namun keberlanjutan jangka panjang tetap memerlukan penguatan kapasitas lokal, keseimbangan peran antaraktor, serta integrasi yang lebih optimal dengan kebijakan public (Lestari et al., 2025).

Dampak	Temuan Utama	Implikasi
Lingkungan	Penghijauan & pengelolaan sampah meningkat	Lingkungan lebih bersih
Sosial	Partisipasi & kesadaran naik	Social learning
Ekonomi	Bank sampah	Nilai ekonomi tambahan
Kelembagaan	Terbentuk kelompok ProKlim	Potensi mandiri

Kolaboratif	Trust meningkat	Kolaborasi berlanjut
-------------	-----------------	----------------------

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor swasta memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pengembangan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kampung Kayu Ara Permai melalui berbagai fungsi, seperti fasilitator, penyedia sumber daya, enabler, mediator, hingga pelaksana program. Keberagaman peran tersebut mengindikasikan bahwa sektor swasta tidak hanya berfungsi sebagai pihak pendukung, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam praktik collaborative governance. Temuan ini sejalan dengan studi Fatkhullah & Habib (2023) Yang menegaskan bahwa keterlibatan sektor swasta mampu meningkatkan efektivitas implementasi ProKlim melalui kontribusi sumber daya serta penguatan kapasitas masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan program berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh keberadaan aktor non-negara yang memiliki akses luas terhadap sumber daya dan jejaring kolaboratif.

Peran sektor swasta sebagai fasilitator dan mediator dalam menjembatani berbagai kepentingan diperkuat oleh penelitian (Basyar & Puspaningtyas, 2022) Yang menyatakan bahwa keberhasilan collaborative governance sangat dipengaruhi oleh keberadaan aktor yang mampu mengintegrasikan kepentingan lintas pihak. Dalam konteks ini, sektor swasta berfungsi sebagai bridging actor yang menghubungkan masyarakat, pemerintah, dan kalangan akademisi, sehingga tercipta sinergi yang memperkuat pelaksanaan program. Kondisi tersebut relevan dengan situasi di Kampung Kayu Ara Permai, di mana sektor swasta berperan sebagai penghubung utama dalam membangun sekaligus menjaga keberlanjutan jejaring kolaborasi.

Dari sisi bentuk dukungan, penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor swasta tidak hanya terbatas pada bantuan finansial melalui skema CSR, tetapi juga meliputi dukungan teknis, penyediaan sarana-prasarana, serta penguatan kelembagaan masyarakat. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Chamidah (2023) Yang menekankan pentingnya integrasi berbagai jenis dukungan dalam menunjang keberhasilan ProKlim. Dukungan teknis seperti pelatihan dan pendampingan terbukti meningkatkan kapasitas masyarakat, sementara penyediaan fasilitas menjadi faktor pendukung utama dalam keberlanjutan kegiatan lingkungan. Selain itu, keterlibatan sektor swasta juga berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dan kesadaran lingkungan, sebagaimana dikemukakan oleh Farihin, (2023) Yang menyebutkan bahwa aktor eksternal dapat berfungsi sebagai katalisator perubahan perilaku masyarakat menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya potensi ketergantungan terhadap sektor swasta, khususnya dalam hal pendanaan dan inisiasi program. Hal ini sejalan

dengan temuan Setyawati et al., (2025) Yang menyatakan bahwa dominasi sektor swasta dalam collaborative governance berpotensi menciptakan ketimpangan peran jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas lokal. Selain itu, keberlanjutan ProKlim sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan kolaboratif yang terbangun, termasuk tingkat kepercayaan dan efektivitas komunikasi antaraktor, sebagaimana dijelaskan oleh Lestari, S. dan Handayani, R. (2022). Secara keseluruhan, peran sektor swasta dalam ProKlim tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga transformasional dalam membentuk sistem kolaborasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan peran, memperkuat kapasitas masyarakat, serta meningkatkan integrasi dengan kebijakan pemerintah daerah guna memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang. (Zagarino, 2025).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sektor swasta memiliki peran yang sangat strategis dan transformasional dalam implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kampung Kayu Ara Permai, merespons permasalahan minimnya keterlibatan sektor swasta secara sistematis serta terbatasnya koordinasi antaraktor yang selama ini menjadi hambatan utama implementasi program. Keterlibatan sektor swasta seperti PHR, CIFOR, SPLP, dan PT ITA tidak hanya sebatas penyandang dana melalui skema CSR, tetapi mencakup fungsi yang lebih luas sebagai fasilitator, enabler, mediator, serta pelaksana langsung kegiatan lapangan, sehingga mampu mengisi kesenjangan sumber daya, teknologi, dan kapasitas yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara mandiri. Melalui kerangka collaborative governance, keterlibatan multi-aktor tersebut terbukti menghasilkan dampak positif secara lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan, yang ditandai dengan meningkatnya pengelolaan sampah, tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat, terbentuknya organisasi lokal, serta menguatnya kepercayaan antaraktor. Namun demikian, dominasi sektor swasta juga berpotensi menciptakan ketergantungan yang perlu diantisipasi melalui penguatan kapasitas masyarakat lokal, keseimbangan peran antaraktor, serta integrasi yang lebih baik antara program ProKlim dengan kebijakan pemerintah daerah, guna memastikan keberlanjutan program dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji kepada Allah SWT, Sang Pemilik segala kemudahan dan sebaik-baik tempat bersandar, saya diberi kekuatan untuk melewati setiap proses hingga artikel ini dapat

terselesaikan dengan baik. Dengan penuh cinta dan rasa hormat, saya mempersembahkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua ibu Aminah dan bapak M.nor tercinta, yang doa-doanya selalu mengalir di setiap sujud, yang kasih sayangnya tak pernah mengenal batas, dan yang pengorbanannya menjadi alasan terbesar saya untuk terus berjuang. Kepada abang, kakak, adik, dan para ponaan tersayang, terima kasih karena telah menghadirkan tawa, kehangatan, dan cinta yang membuat hati saya selalu merasa pulang. Kepada teman-teman terkasih, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang menjadikan perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh warna. Dengan rasa hormat yang mendalam, saya menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan menuntun saya dengan ilmu dan ketulusan hingga artikel ini mencapai bentuk terbaiknya. Ucapan apresiasi setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada Laskar Mandiri, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), PT Imbang Tata Alam, Siak Pelalawan Landscape Programme, dan Center for International Forestry Research (CIFOR) yang telah memberikan dukungan, kontribusi, serta inspirasi berharga dalam proses penulisan artikel ini. Semoga setiap doa, cinta, perhatian, dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya dibalas oleh Allah SWT dengan keberkahan, kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan yang tak terhingga. Aamiin ya Rabbal ‘alamin.

DAFTAR REFERENSI

- Ajemba, M. N., & Arene, E. C. (2022). *Possible advantages that may be enhanced with the adoption of research triangulation or mixed methodology*. 4–7.
- Amir, M. Y., Haning, M. T., Nara, N., Yunus, M., Susanti, G., Achmadi, B., & Ibrahim, M. A. (2022). *Role of Kalla Group in Collaborative Governance Implementation of Covid- 19 Management in Makassar City*. 1(3), 185–192.
- Anhar, A., Putra, E. V., Selaras, G. H., Marten, T. W., Farikh, M., & Farma, S. A. (2023). *Penguatan Kapasitas Pengelola Bank Sampah Kasaro Nagari Tanjung Balik dengan Pendekatan Berkearifan Lokal*. 23(2), 71–78. <https://doi.org/10.24036/sb.05170>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Basyar, M. R., & Puspaningtyas, A. (2022). *Collaborative Governance in CSR Management Program for Slum Area Rehabilitation*. 2515(1).
- Chamidah, N. (2023). *Mangrove: Collaboration and Conflict Between Companies and Communities Mangrove: Kolaborasi dan Konflik Antara Perusahaan dan Komunitas*. 1.
- Farihin, A. U. (2023). *Meningkatkan Kesadaran Lingkungan melalui Edukasi dan Partisipasi Masyarakat*. 01(1), 21–32.
- Fatkhullah, M. (2023). *Reducing Greenhouse Gas Emissions through Community-based*

Action : an Analysis of the Program Kampung Iklim in Indonesia. 11(01), 28–37.

- Giyanto, B., & Murtinah, T. S. (2023). *Collaborative Governance in the Development of Digital Villages in Karanganyar Indonesia. 2023, 337–361.* <https://doi.org/10.18502/kss.v8i11.13557>
- Government, S., & Sector, P. (2024). *Moccasin Journal De Public Perspective. 174–187.*
- Hudaya, M. R., & Dewi, T. P. (2021). Collaborative Governance Dalam Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang. *Komunitas, 12(1), 1–10.* <https://doi.org/10.20414/komunitas.v12i1.3355>
- Indriyani, S., Sunarto, S., & Indrawan, M. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Iklim Berbasis Partisipasi Evaluation of the Implementation of the Climate Village Program Based on Community Participation (Case Study in RW 09 , Pucangsawit Village). *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia, 13(September), 110–124.*
- Iskandar, M. J. (2022). *Jurnal Abdimas Rinjani (JAR) Jurnal Abdimas Rinjani (JAR). 2(2), 8–13.*
- Judijanto, L., Damanik, F. H. S., Kusnadi, I. H., Ahmadun, A., & Leuwol, N. V. (2023). Analisis partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik: menilai efektivitas model keterlibatan warga. *Jurnal Cahaya Mandalika, 3(2), 1779-1787.* Khasanah, R. P., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2021). *Collaborative Governance In National Community Empowerment Programs In Poverty Alleviat. 9(1), 29–35.* <https://doi.org/10.31289/jppuma.v9i1.3755>
- Khuriyatul husna, & Alexsander Yandra. (2023). ProKlim: Institutional Data Inventory Assistance at Site Level. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1).* <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i1.13371>
- Lestari, E., Rusdiyana, E., Sugihardjo, S., Setyowati, R., Wibowo, F., & Arwindianti, M. L. (2025). Implementation of the Climate Village Program (PROKLIM) in Karanganyar, Indonesia. *BIO Web of Conferences, 189.* <https://doi.org/10.1051/bioconf/202518903004>
- Lumajang, D. K. (2025). *Pentahelix analysis dalam program kampung iklim (proklim) di kelurahan ditotrunan kabupaten lumajang.*
- Muchtar, A. (2025). *Exploring Stakeholder Collaboration in Addressing Watershed Degradation. 5(3), 1573–1586.*
- Nurhasanah, D., Gumilar, Y., & Akbar, S. (2022). *Stakeholder mapping in the Climate Village Program in DKI Jakarta. 10(2), 149–158.* <https://doi.org/10.31289/jppuma.v10i2.7077>
- Oktaviana, R. F., & Setiawan, R. 2021. (n.d.). *Analisis Jejaring Aktor Dalam Program Kampung Iklim Kelurahan Bukit Cermin Analysis Of Actor Networks In The Climate Village Kampung Iklim (Proklim) yang diatur pada ditargetkan dalam jangka panjang , hal ini pencapaian NDC (Nationally Determind Kota T.*
- Pemberdayaan, P., Melalui, K., & Lingkungan, P. (2025). *J. A . I : Jurnal Abdimas Indonesia. 516–523.*
- Pradessa, A., Anantanyu, S., & Widiyanti, E. (2025). *Pengembangan Program Kampung Iklim Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Ngadirejo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 4, 30–39.*
- Purnaweni, H., Soeprobowati, T. R., & Chatterjee, U. (2025). *The Role of Stakeholders in Community Based Mangrove Management in Tapak Area of Semarang City. 02047.*

- Raditya, A., Suwartiningsih, S., & Siahainenia, R. R. (2025). Kontribusi Program Kampung Iklim Dalam Mendukung Capaian SDGs di Tingkat Lokal: Studi Pengalaman Masyarakat Kelurahan Mangunsari. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 7743–7757.
- Rusanda, N., Indriana, H., & Falatehan, S. F. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Adaptasi terhadap Perubahan Iklim: Keberlanjutan Program Kampung Iklim (Proklim) di Desa Cibanteng. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 9(3), 139–153. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v9i3.1505>
- Safrina, Roesa, N., & Rosemary, R. (2022). *Civil law review*. 3(2), 137–151. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.945>
- Setiawati, B., Suparti, H., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2024). *Village government capability in collaborative governance*. 8(1). <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v8i1.948>
- Setyawati, L., Heri, R., & Wandan, F. (2025). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam konteks Program Kampung Iklim di Kota Bandung. *Jurnal Inovasi Dan Pengelolaan Lingkungan*, 9(1), 40–54. <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/detail?id=xxxxxx>
- Sosial, J. I., & Issn, H. (2022). *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora ISSN 1411 - 0911 : eISSN: 2443-2660*. 24(2), 193–198. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v24i2.34403>
- Susanti, A. A., Antika, A. A., Pratama, R., & Pradana, F. G. (2022). *Implementasi dan Pengembangan Program Unggulan Kampung Iklim (Proklim) di Desa Kertonatan*. 4(1), 58–68. <https://doi.org/10.23917/bkkndik.v4i1.19183>
- Velinsca, Y. dan H. (2025). Journal of Public Administration Review Efektivitas Program Kampung Iklim (PROKLIM) Di Dusun Barat Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. *Yolanda Velinsca Dan Herman Journal of Public Administration Review*, 2(1), 165–190. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar>
- Wahyuningwidi, I. (2023). *Waste Bank Program Analysis Through Optimization Of The Role Of Institutions Based On Collaborative Governance (Case Study Of Pematang Pudu Bersih Waste Bank , Mandau District)*. 1(2), 31–36.